



Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Karanganyar  
Jl. Lawu No. 385 B,  
Komplek Perkantoran Cangaan,  
Karanganyar, 57712

# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018-2023

KANTOR BUPATI KARANGANYAR

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 telah selesai disusun. Renstra DISKOMINFO Kab. Karanganyar merupakan pedoman perencanaan selama lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Renstra DISKOMINFO, perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang persandian, statistik dan komunikasi dan informatika di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan terarah dan terukur.

Tolok ukur yang nyata dan jelas, dipakai dalam pengukuran kinerja DISKOMINFO Kab. Karanganyar guna ketercapaian visi dan misi secara bertahap. Keterukuran kinerja merupakan bentuk komitmen DISKOMINFO terhadap upaya akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan secara transparan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan kewenangan. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO disamping sudah menjadi keharusan demi ketercapaian tujuan juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang terus berubah. Di era keterbukaan, transparansi kinerja pelayanan publik sudah menjadi tuntutan, dan lembaga publik seperti DISKOMINFO harus siap mengantisipasi, menjalankan dan memikul konsekuensinya.

Penyusunan Renstra DISKOMINFO Kab Karanganyar tahun 2018-2023 mendasarkan diri pada Perda Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian seluruh penyelenggaraan urusan persandian, statistik dan komunikasi informatika Kab Karanganyar diarahkan sebagai wujud implementasi dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yakni “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Karanganyar, ..... Mei 2019  
Plt. KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. BACHTIYAR SYARIF

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota .....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.....	9
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 .....	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018.....	14
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 (per 31 Desember 2018) ..	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.....	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.....	22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	27
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar .....	34
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo RI .....	39
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Renstra Badan Pusat Statistik .....	43
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023 .....	51
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023 .....	53
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar Tahun 2018-2023 .....	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Berdasarkan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	65

## DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL .....	i
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	iii
	DAFTAR ISI .....	iv
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A Latar Belakang .....	1
	B Landasan Hukum .....	3
	C Maksud dan Tujuan .....	6
	D Sistematika Penulisan .....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR	8
	A Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
	B Sumber Daya .....	13
	C Kinerja Pelayanan .....	17
	D Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKAB.KARANGANYAR	26
	A Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
	B Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Karanganyar.....	27
	C Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi .....	34
	D Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	45
	E Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	50
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	64
BAB VIII	PENUTUP .....	67



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi seperti saat ini teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangan yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu, maka informasi sehingga memudahkan manusia untuk mencari, mempelajari dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan mudah, dimana saja, kapan saja, dan dari siapa saja.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran dalam bidang kehidupan seperti dalam hal telekomunikasi, dengan kemudahan berkomunikasi, manusia seakan menjadi lebih dinamis. Informasi tentang peristiwa ditempat yang jauh dengan mudahnya didapatkan dengan bantuan alat-alat tersebut. Kehadiran internet dalam teknologi informasi dan komunikasi membantu aktivitas dan urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam bidang pemerintahan seperti meningkatkan kinerja pemerintah. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan disegala bidang. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan TIK dengan istilah E-government. *Penerapan E-government* merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi *e-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna.

Sebagai sebuah badan atau lembaga publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membuat kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadi tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penyebaran informasi, pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan

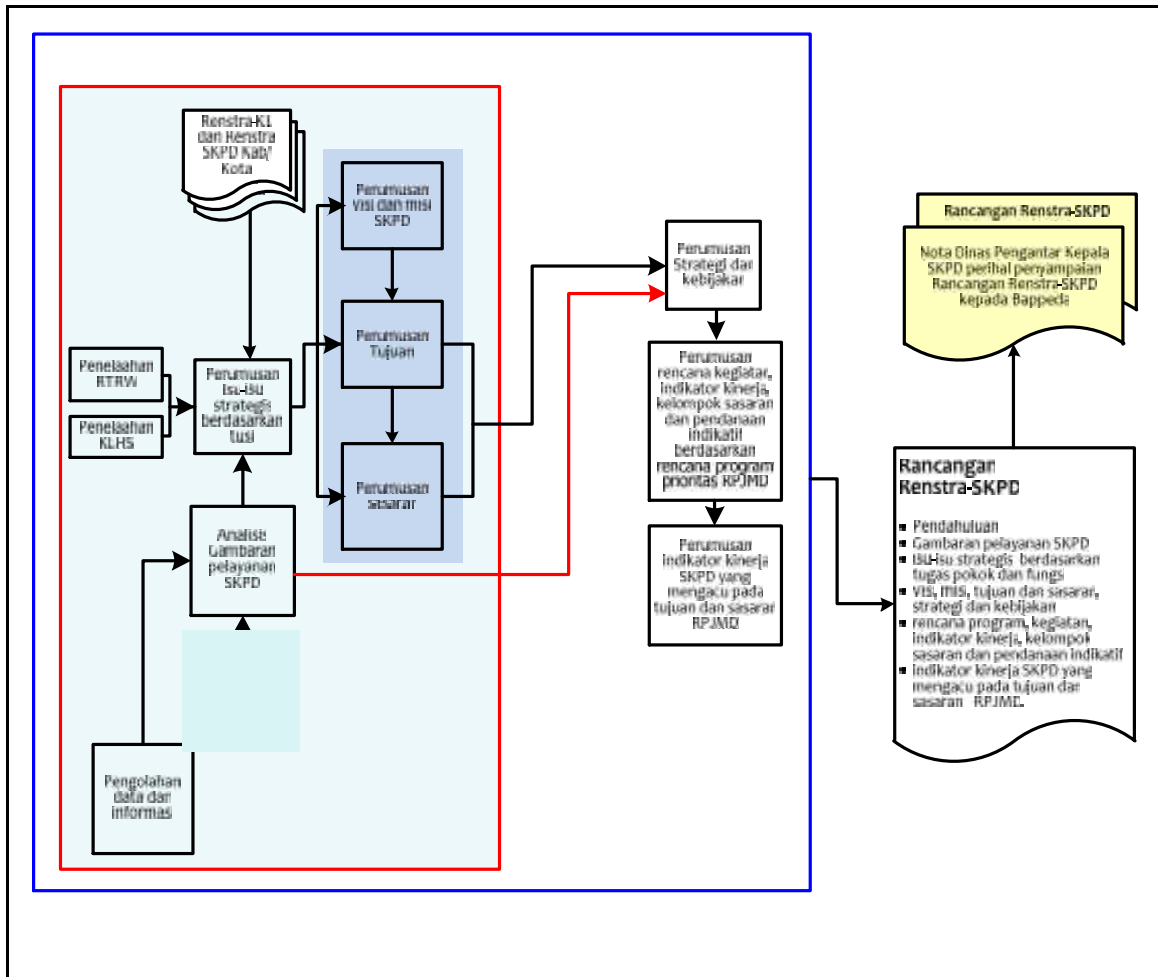
tugas dan fungsi tersebut maka disusunlah rencana strategis Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Karanganyar

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara; Renstra Badan Pusat Statistik; renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar, dan memperhatikan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, renstra Badan Siber dan Sandi Negara dan renstra Badan Pusat statistik.
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra**  
**Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan renstra Dinas Komunias dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);



3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **Bab I    Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

**Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

**BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, telaahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

**BAB V Strategi dan Kebijakan :**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

**BABII**

**GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ``**

**1. Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

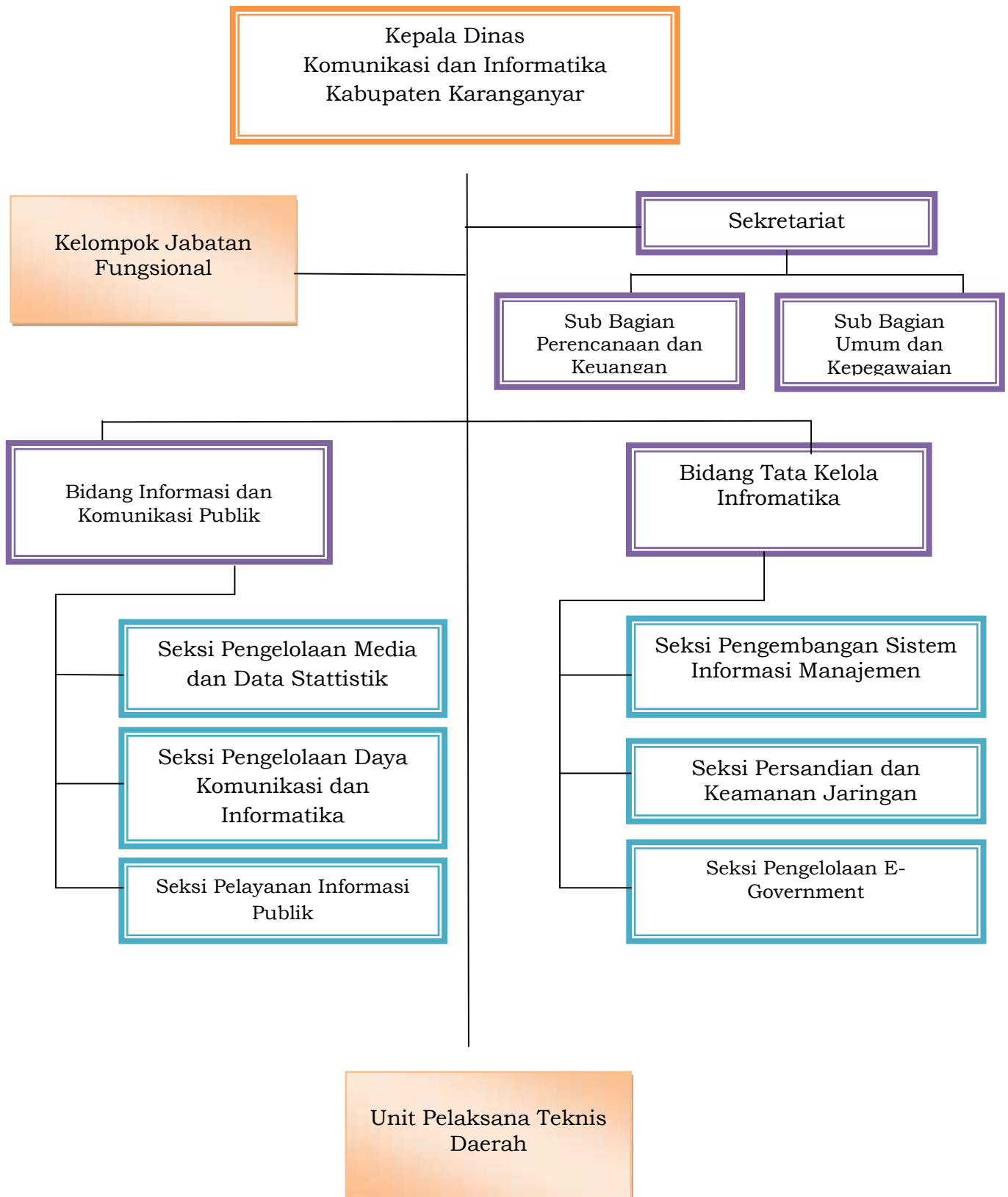
Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi ;
  - 1) Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik;
  - 2) Seksi Pengelolaan Daya Komunikasi dan Informatika;
  - 3) Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- d. Bidang Tata Kelola Informatika, membawahi ;
  - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
  - 2) Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan;
  - 3) Seksi Pengelolaan E-Government.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

## Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2017

## 2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan komunikasi dan informasi, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

### 1) Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam susunan organisasinya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas :

- a) Merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi public, dan bidang pengembangan informatika berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pelaksanaan kegiatan;
- c) Mengkoordinasikan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik, serta bidang pengembangan informatika, dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahannya dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik, serta bidang pengembangan informatika;
- f) Menyelenggarakan kebijakan kesekretariat dan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- g) Menilai dan mengevaluasi kinerja jawatan untuk memacu prestasi kerja;
- h) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban ; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sekretariat



Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian kegiatan;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kerjasama, arsip dan dokumentasi;
- d) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya : dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- b) Pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- c) Pengelolaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Tata Kelola Informatika;**

Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola informatika. Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan e-Government, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan e-Government;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan e-Government, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan e-Government;
- c) Pengelolaan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan e-Government, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan e-Government;
- d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan e-Government, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan e-Government;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sumber Daya**

## 1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar keadaan per 31 Desember 2018 sejumlah 42orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2/ Magister	7	4	1	-	<b>12</b>
2.	S1/ Sarjana	9	13	7	3	<b>29</b>
3.	D III	1	2	1	2	<b>4</b>
4.	SMA/ Sederajat	3	3	3	-	<b>9</b>
5.	SD/ Sederajat	0	0	-		<b>0</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>54</b>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 22,22 % ( 12 orang); berpendidikan S1 sebesar 53,70 % ( 29 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 16,66 % ( 9orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas KomunikasidanInformatika Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 27 orang, Golongan II sebanyak 7 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2017**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV			8
2.	Golongan III			27
3.	Golongan II			7
4.	Golongan I			1
5.	Non Golongan			
	<b>Jumlah</b>			<b>42</b>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2017

## 2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika keadaan bulan Desember 2018 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Data Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2018 (per 31 Desember 2018)**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	5	2	7
2	Kendaraan roda 2	9	-	9
3	AC Split	9	-	9
4	Alat penghancur kertas	-	-	-
5	Brand kas	-	-	-
6	Audio Amplifier	1		1
7	Antene	-	-	-
8	Camera video	7	-	7
9	Facsimile	-	-	-
10	Exhause Fan	-	-	-
11	Gambar presiden /Wapres	1	-	1
12	Filling Besi/Metal	8	-	8
13	Handy cam	1	2	3
14	Head Set	-	-	-
15	Kitchen Set	-	-	-
16	Kipas angin	-	1	1
17	Kompor gas	-	-	-
18	Kursi pejabat eselon II			
19	Kursi pejabat eselon III			
20	Kursi pejabat eselon IV			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
21	Kursi putar			10
22	Kursi rapat			81
23	Kursi tamu			2
24	Lambang negara (garuda)			2
25	Laptop			18
26	Lensa kamera			1
27	Meja kerja			
28	Meja kerja pegawai			25
29	Meja kerja eselon II			
30	Meja kerja eselon III			
31	Meja kerja eselon IV			3
32	Modem			1
33	Note book			8
34	PC Unit/Komputer PC			53
35	Printer			12
36	Scanner			1
37	Sound system			1
38	Speaker Aktive Komputer			
39	Tabung gas			
40	Telephone (PABX)			
41	Tape recorder			
42	Tangga aluminium			1
43	Televisi			5
44	UPS			8
45	White board			1
46	Wireless			21
47	Stabilisator			1
48	Monitor			9
49	Kursi kerja			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>310</b>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2017

Berdasarkan tabel diatas, kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik, akan tetapi kondisi gedung kantor yang harus mendapatkan perhatian karena kondisinya kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

### C. Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi :
  - a. Meningkatkan Pelayanan PPID kepada Masyarakat;
  - b. Meningkatkan mutu pelayanan informasi melalui media elektronik;
  - c. Meningkatkan Pelayanan Internet SKPD;
  - d. Meningkatkan *public access internet*;
  - e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran LPPL Radio Swiba Karanganyar;
  - f. Sosialisasi dan monitoring penggunaan legal software;
  - g. Perencanaan dan Implementasi *e-Government*;
  - h. Perencanaan, penyusunan dan pembuatan *data centre*;
  - i. Mengembangkan Sistem Informasi melalui GIS;
  - j. Pembuatan Aplikasi SIM (Komunikasi dan Informasi)
  - k. Maintenance jaringan komunikasi dan informasi.
3. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, meliputi :
  - a. Meningkatkan Skill, Knowledge, Attitude (SKA) Aparatur dalam Pelaksanaan Tupoksi.
  - b. Meningkatkan SDM pengelola informasi dan dokumentasi bagi pengelola Website.

- c. Pelaksanaan Pelatihan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - d. Pelaksanaan Bimbingan teknis penyiaran/pemberitaan.
4. Kerjasama Informasi dengan Mass Media, meliputi :
- a. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan kerja sama dengan mass media;
  - b. Pembentukan KIM di 17 Kecamatan, terciptanya arus informasi yang akurat, efisien dan akuntabel;
  - c. Pembentukan Pengurus FK METRA dan terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang komunikasi dan informatika.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Tahun 2014-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut.







No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	internet																
	<b>Urusan Statistik</b>																
1	Buku Kabupaten Karanganyar dalam angka	<b>buku</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Buku PDRB Kabupaten Karanganyar	<b>buku</b>	100	100	100	60	60	100	100	100	60	60	100	100	100	100	100
	<b>Urusan Persandian</b>																
1	Jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian	<b>lembar</b>	300	300	300	360	360	300	300	300	360	360	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2017

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Dinas KomunikasidanInformatika Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2014-2018**

No	Program	Anggaran pada Tahun 2014-2018 (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2018 (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2018					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program PelayananAdministrasiPerkantoran	333.492	579.427	548.650	397.937	436.000	325.779	560.909	537,807	352.772	301.500	97,68%	96,80%	98,02%	88,65%	69,15%	45,91%	41,57%
	Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur	180.656	124.065	140.100	124.600	381.350	177.193	118,950	139.660	204.111	281.350	98,08%	95,87%	99,64%	163,81%	73,78%	19,01%	18,42%
4	Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa	392.288	413.761	431.201	1.066.240	485.795	385.073	410.292	423.515	273.029	258.000	98,16%	99,16%	98,21%	25,61%	53,11%	55,78%	34,99%
5	Program FasilitasiPeningkatan SDM BidangKominikasidanInformasi	185.000	1.093	76.296	30.000	20.000	182.120	41.045	67.000	7.500	7.482	98,44%	99,88%	87,81%	25,00%	37,41%	7,04%	6,10%

No	Program	Anggaran pada Tahun 2014-2018 (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2018 (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2018					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
6	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	183.600	176.791	169.704	77.200	166.600	183.597	176.491	167.304	82.106	166.600	99,99%	99,83%	98,58%	106,35	100,00	15,47%	15,52%
7	Program KerjasamaInformasidengan Mas Media	679.572	866.978	925.350	1.889.346	1.298.959	678.079	733.023	922.119	1.931.121	1.240.850	99,78%	84,54%	99,65%	102,21	95,53	113,20%	110,10%
8	Program Pengembangan Data/InformasidanStatistik	160.000	160.000	160.000	160.000	175.000	160.000	160.000	160.000	435.000	160.000	100%	100%	100%	271,88	91,43	16,30%	21,50%
9	Program OptimalisasiPemanfaatanT eknologiInfor masi	1.230.278	1.897.023	4.168.522	3.549.967	2.265.324	1.187.676	1.608.127	3.986.331	3.631.439	1.913.400	96,53%	84,77%	95,62%	102,30	84,46	262,22%	246,53%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.344.686</b>	<b>4.259.138</b>	<b>6.619.823</b>	<b>7.295.290</b>	<b>5.229.028</b>	<b>3.279.517</b>	<b>3.808.937</b>	<b>6.403.754</b>	<b>6.917.078</b>	<b>4.329.182</b>	-	-	-	-	-	<b>297,19%</b>	<b>198,01%</b>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Karanganyar, 2019

## **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

### **1. Tantangan**

- a) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi serta masih sulit dan mahal biaya komunikasi;
- b) Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
- c) Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama;
- d) Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;
- e) Belum optimalnya perijinan di bidang komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar.

### **2. Peluang**

Beberapa peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar di masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
- b) Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- c) Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- d) Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
- e) Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang komunikasi dan informatika.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1. Permasalahan Sekretariat:**

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

**2. Permasalahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:**

- a. Belum optimalnya pemanfaatan KIM oleh masyarakat;
- b. Banyak KIM yang tidak aktif;
- c. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
- d. Belum terintegrasinya sistem data dan statistik;

**3. Permasalahan Bidang Tata Kelola Informatika:**

- a. Belum optimalnya Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Kurang optimalnya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- c. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal karena belum semua website di masing-masing OPD terintegrasi;
- d. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah

- sehingga tidak diupdate dan bahkan ada yang sudah mati;
- e. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah;
  - f. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
  - g. Kurangnya peralatan persandian.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM TIK dan persandian	Kapasitas SDM TIK dan persandian yang masih kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart
		Belum semua aplikasi di perangkat daerah saling terintegrasi	Lemahnya koordinasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan e-govt
		Kurangnya infrastruktur jaringan dan peta lebar (bandwith) serta perangkat keras dan lunak	
		Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK	Belum optimalnya KIP
		Terlambatnya penerbitan buku statistik daerah	Data yang kurang akurat
		Belum optimalnya kapasitas lembaga persandia	Terbatasnya SDM dan lembaga pengelola sandi

## **B. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:



## **“ Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar ”**

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

### **1. Berjuang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

### **2. Bersama**

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara

akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

### **3. Memajukan**

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;

d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;

- b. **Asebagai** Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. J **sebagai** Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat **berdaya** saing tinggi.

#### **4. Karanganyar**

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

##### **1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang..

##### **2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang

kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

### **3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

### **4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

### **5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaankeyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat

menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Komunikasi dan Informasi adalah: **Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik** dengan sasaran: **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas**.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi :  <b>Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</b></p> <p>Tujuan :  Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran :  Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tebatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang menguasai bidang komunikasi dan informatika.</li> <li>2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>3. Belum optimalnya pelayanan e-<i>Government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.</li> <li>4. Kurang optimalnya pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi bidang komunikasi dan informatika.</li> <li>2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung komunikasi dan informatika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjalannya hubungan yang baik dengan OPD lain dan juga dengan pemangku kepentingan (stakeholders).</li> <li>2. Adanya komitmen pimpinan dengan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.</li> </ol>

*Sumber: Hasil analisis, 2019*

### **C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi**

#### **1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019**

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu:

**"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; sert
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di



bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan;
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah kebijakan dan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, dengan strategi:
  - 1) Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring;

- 2) Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota;
  - 3) Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO;
  - 4) Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri;
  - 5) Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional;
  - 6) Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan;
  - 7) Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional;
  - 8) Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK;
  - 9) Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
  - 10) Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi.
- b. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan strategi:
- 1) Menyebarkan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah;
  - 2) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
  - 3) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat,

objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

4) Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.

c. Mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif, dengan strategi:

1) Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien;

2) Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan;	Kurangnya pemanfaatan TIK oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebutuhan akses telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi	Perkembangan media sosial yang semakin pesat
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai <i>leading sektor</i> dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik;	1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi di seluruh wilayah; 2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;	Investasi teknologi dan informasi yang mahal	Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain
3	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi	Belum tersedianya regulator pendukung pelaksanaan TIK	Ketidaksesuaian antara regulasi telekomunikasi daerah dengan kondisi faktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ;</li> <li>• Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	publik;			menerus oleh Pemerintah Kabupaten
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah;</li> <li>2. Kurang optimalnya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);</li> <li>3. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga tidak diupdate dan bahkan ada yang sudah mati;</li> <li>4. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal karena belum semua website di masing-masing OPD terintegrasi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang informatika ( TI )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat TIK sudah mendukung</li> <li>• Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2017

## 2. Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Visi Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun 2015-2019 adalah:

**"Menjadi Penyelenggara dan Pembina Tunggal Persandian Negara Dalam Menjamin Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Atau Negara Serta Menyajikan Hasil Pengupasas Informasi Bersandi Guna Turut Serta Menjaga Keamanan Nasional"**

Untuk mendukung visi tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran Badan Siber dan Sandi Negara adalah:

- a. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian;
- b. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.

## 3. Renstra Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan visi dan misi memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014. Untuk tahun 2015-2019 BPS menetapkan visi:

**"Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua"**  
*(The Agent of Trustworthy Statistical Data for All)*

Untuk mendukung ketercapaian visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi misi BPS untuk kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1:  
 Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, dengan sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;

- b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*);
  - c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien.
2. Tujuan 2:  
Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*).
3. Tujuan 3:  
Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;
  - b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.
4. Tujuan 4:  
Peningkatan birokrasi yang akuntabel, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;
  - b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
  - c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Badan Pusat Statistik yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> ); c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien.	1. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah; 2. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data yang sulit;</li> <li>• Pengumpulan data yang seringkali terlambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen untuk menyediakan data yang selalu up date;</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> ).	Data tidak ter-up date tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data yang sulit;</li> <li>• Pengumpulan data yang seringkali terlambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan data yang selalu up date</li> <li>• Komitmen untuk menyediakan data yang selalu up date;</li> </ul>
3	a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.	Belum terintegrasinya sistem data dan statistik	Data dan statistik belum saling terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemajuan TI dalam mendukung penyediaan data yang terintegrasi</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	<p>a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;</p> <p>b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;</p> <p>c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.</p>	Kurangnya sumber daya pengelola statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang SDM dan OPD pendukung di bidang pengelolaan statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software untuk updating sudah lebih baik, mudah untuk di update;</li> <li>• Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan</li> </ul>

#### **4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi misi dalam renstra sebagai berikut:

**"Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi;
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

##### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan

informatika. RTRW Kabupaten Karanganyar 2013-2032 bertujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

- a. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
- b. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
- c. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
- d. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;
- e. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- f. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
- g. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;

- h. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
- i. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
- j. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
- k. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

- a. Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon;
  - 1) Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum

dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan

- 2) penyediaan sarana warung telepon (wartel) dan telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
- b. Infrastruktur telepon nirkabel yang berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi. Upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi daerah disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.

## **2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **E. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* dan keterbukaan informasi publik;
2. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan;
3. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan: ***Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian***Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah: ***Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian.***

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian	Indeks SPBE			Nilai	NA	2,14	2,37	2,69	2,91	3	3
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik,	Persentase layanan publik yang berbasis elektronik	%	40	45	50	60	70	85	85
		ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	5	10	15	20	25	30	30
			Persentase ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan (UU 23 tahun 2014)	%	60	70	80	90	100	100	100
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2019



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **A. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

***Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian***

#### **B. Kebijakan**

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus pada melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK, penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan, komunikasi, informasi, statistik dan persandian	Meningkatnya keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola e-government melalui e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-system pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi; meningkatkan kapasitas kelembagaan persandian	Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus pada melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan rumah tangga;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

1. Penyediaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan alat-alat studio;
3. Pengadaan peralatan gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
7. Pemeliharaan rutin/ berkala hardware/ software.

#### **C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Peningkatan SDM.

#### **D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Menyusun renstra OPD.
3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4. Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**E. Program Pengembangan Data/Informasi**

Kegiatan :

1. Penyusunan Buku Statistik

**F. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Kegiatan :

1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
2. Pengelolaan Aspirasi Publik
3. Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal
4. Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
5. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informasi
6. Sosialisasi Perda/Perbup
7. Penerbitan Media Cetak Pemerintah
8. Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar
9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
10. Liputan Kegiatan Pimpinan/ Siaran pers
11. Siaran Keliling
12. Sosialisasi Forum Data Statistik
13. Pembinaan Internet

**G. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Kerjasama dengan Media Massa
3. Promosi Informasi
4. Peringatan Hari Radio Nasional
5. Press Tour

**H. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Bandwidth
2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kab. Karanganyar

3. Pengelolaan/ Pemeliharaan Website
4. Pengelolaan Data Informasi
5. Peningkatan Sarana Pengelolaan Data Elektronik
6. Operasional Sekretariat LPSE
7. Pengembangan Hotspot
8. Fasilitasi dan Pengembangan Smart City
9. Disaster Recovery Center (DRC)
10. Pengembangan Aplikasi Sisten Informasi Managemen Daerah (SIMDA)
11. Pengelolaan CCTV Online
12. Operasionalisasi Papan Reklame Elektronik
13. Pengelolaan Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat)
14. Perkantoran Elektronik
15. Pengelolaan Sambernyawa Information System (SIC)
16. Pengelolaan Videowall

**I. Program Persandian**

1. Pengelolaan Persandian
2. Operasional Sekretariat BLC
3. Pengembangan Jaringan WAN Kab. Karanganyar

**J. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan :

1. Penyusunan Perubahan perda dan perbup pengendalian menara telekomunikasi

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1. sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2018-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Renstra	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi, informasi, statistik dan persandian									2.343.000.000		9.019.000.000		9.079.000.000		7.953.000.000		8.389.000.000		36.323.000.000
	Indeks SPBE				Indeks	NA	2,14		2,37		2,69		2,91		3		3		
	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika							554.200.000		1.282.000.000		1.438.000.000		1.591.000.000		1.771.000.000		6.636.200.000	
	Nilai SAKIP				Skor	NA	NA		65		67		69		70				
	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran							220.600.000		449.000.000		496.000.000		541.000.000		586.000.000		2.292.600.000	
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				%	100	100		100		100		100		100		100		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pengadaan materai.	lembar	200	200	1.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	250	4.000.000	250	4.000.000	1.200	15.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon	Bulan	12	12	40.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	60	310.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan sevice kendaraan dinas/operasional	Bulan	12	12	17.800.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	60	207.800.000
				Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	12	20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	60	170.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	Bulan	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	60	125.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik	Bulan	12		0	12	10.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	48	70.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	0	12	100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000	24	430.000.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	bulan	12	12	26.600.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	37.000.000	12	40.000.000	60	168.600.000

			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar harian	bulan	12	12	25.200.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	60	141.200.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	bulan	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	145.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	kali	27	27	50.000.000	27	100.000.000	27	110.000.000	27	120.000.000	27	130.000.000	135	510.000.000
			<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>134.600.000</b>		<b>528.000.000</b>		<b>580.000.000</b>		<b>635.000.000</b>		<b>717.000.000</b>		<b>2.594.600.000</b>
				<b>Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
			Penyediaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	bulan	12	12	0	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	60	860.000.000
			Pengadaan alat alat studio	Terpenuhinya kebutuhan kamera	unit		2	34.000.000	2	173.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	2	200.000.000	10	777.000.000
			Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	unit		1	4.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	5	4.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan ganti oli bagi kendaraan dinas rodan 4 dan roda 2.	bulan		12	75.600.000	12	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	60	650.600.000
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	0	0	12	25.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	48	115.000.000
			Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya ruang kerja yang nyaman	bulan		12	6.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	60	63.000.000
			Pemeliharaan rutin/ berkala hardware/ software	Terwujudnya peralatan kerja dalam kondisi baik	bulan		12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	60	125.000.000
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					<b>88.000.000</b>		<b>190.000.000</b>		<b>235.000.000</b>		<b>280.000.000</b>		<b>325.000.000</b>		<b>1.118.000.000</b>
				<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
			Pendidikan dan pelatihan SDM	Terlaksananya pengiriman peserta Pelatihan bagi PNS	paket		1	20.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	5	300.000.000
			Peningkatan SDM	Meningkatnya kinerja aparatur	kali		1	68.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	5	818.000.000





2.2. Persentase layanan publik berbasis elektronik		%	40	45	50	60	70	85						
<b>Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>					<b>306.700.000</b>		<b>1.022.000.000</b>		<b>1.224.000.000</b>		<b>1.233.500.000</b>		<b>1.333.000.000</b>	<b>5.119.200.000</b>
	<b>Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)</b>	%	<b>61,9</b>	<b>69,05</b>		<b>78,57</b>		<b>85,71</b>		<b>92,86</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
	<b>Persentase KIM aktif</b>	%	<b>35,29</b>	<b>47,06</b>		<b>58,82</b>		<b>76,47</b>		<b>88,24</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas bidang kehumasan	orang		0	0	50	30.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	200 140.000.000
Pengelolaan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Sapamas dan Media Sosial Pemerintah	bulan				12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	48 600.000.000
Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga Penyiaran (LPS dan LPK)	kegiatan	0	0	0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	8 110.000.000
	Pemeliharaan Pemancar Radio dan alat studio	bulan	12		0	12	0	12	50.000.000			12	50.000.000	100.000.000
	Kegiatan Siaran Langsung Event Pemerintah, Jasa Penyiar	orang/jam				180	140.000.000	180	140.000.000	180	140.000.000	180	140.000.000	180 560.000.000
	Diperolehnya Ijin Stasiun radio, terbayarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi.	ijin				1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4 100.000.000
Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Diperolehnya Ijin Stasiun radio	ijin		1	10.000.000		0		0		0		0	1 10.000.000
Perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informasi	Terlaksananya Rakor PPID dan tertatanya website OPD	kali		1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5 335.000.000
Sosialisasi Perda/Perbup	Jumlah peserta sosialisasi Perda/Perbup	Orang	0	0	0	60	15.000.000	60	15.000.000	60	17.500.000	60	20.000.000	240 67.500.000
Penerbitan Media Cetak Pemerintah	Terlaksananya penerbitan Majalah Intanpari Karangayar					725	200.000.000	725	215.000.000	725	225.000.000	725	240.000.000	
	Terlaksananya cetak booklet/ pamflet/ leaflet dan sejenisnya					2.000	12.000.000	2.000	14.000.000	2.000	16.000.000	2.000	18.000.000	

Penerbitan Majalah Intanpari	Terlaksananya menerbitkan Majalah Intanpari Karangayar Tentram	Eksemplar		725	50.000.000		0		0		0		0	3.625	930.000.000
Pengadaan Booklet Intanpari	Terlaksananya cetak booklet/ pamflet/ leaflet	lembar		20000	10.000.000		0		0		0		0	10.000	70.000.000
Dokumentasi Kegiatan Pemkab Karanganyar	Terlaksananya pembuatan klipping Pers	bendel		300	40.500.000	300	90.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1.500	430.500.000
Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan KIM	Kelompok	17	2	15.000.000	17	80.000.000	17	100.000.000	17	100.000.000	17	100.000.000	70	395.000.000
Liputan Kegiatan Pimpinan/ Siaran Pers	Terlaksananya liputan kegiatan Pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dan rilis berita melalui media online (web) dan media cetak	kali	400	1000	89.200.000	400	110.000.000	400	120.000.000	400	120.000.000	400	120.000.000	1.700	559.200.000
Siaran Keliling	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui siaran keliling	kali		5	4.000.000	5	25.000.000	5	35.000.000	5	45.000.000	5	55.000.000	25	164.000.000
Sosialisasi Forum Data Statistik	Terlaksananya Sosialisasi Forum Data Statistik	kali		2	23.000.000	2	50.000.000	2	70.000.000	2	90.000.000	2	110.000.000	10	343.000.000
Pembinaan Internet	Terlaksananya kegiatan peningkatan literasi digital masyarakat	kali		2	15.000.000	3	30.000.000	4	50.000.000	5	60.000.000	2	50.000.000	16	205.000.000
<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>					<b>641.200.000</b>		<b>1.944.000.000</b>		<b>#####</b>		<b>#####</b>		<b>#####</b>		<b>6.639.200.000</b>
<b>Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %]</b>		<b>%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>		<b>55</b>		<b>60</b>		<b>60</b>		<b>60</b>		<b>60</b>	
Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan sambung rasa melalui Radio Swiba	bulan		12	133.800.000	12	140.000.000	12	145.000.000	12	150.000.000	12	155.000.000	60	723.800.000
	Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui Media Tradisional/Pertunjukan Rakyat .	kali		1		2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	9	250.000.000

		Terlaksananya mengikuti kegiatan pameran Pembangunan	kali		1	10.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	215.000.000
	Pemberdayaan FK Metra	Terlaksananya pengiriman Tim Kesenian Tradisional Karanganyar ke ajang Festival Pertunjukan rakyat tingkat Propinsi Jateng	kali			20.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pameran	Terlaksananya mengikuti kegiatan pameran Pembangunan	kali		1	10.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama dengan Media Massa	Terlaksananya Pemasangan Iklan di media massa dan Kanal Khusus Online	kali		3 2	306.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	160	2.306.000.000
		Terselenggaranya kegiatan Jumpa pers Bupati Karanganyar dengan wartawan	kali			0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	400.000.000
		Terselenggaranya talkshow Bupati dan pejabat Pemkab. Karanganyar dengan masyarakat melalui media televisi	kali			0	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	32	600.000.000
		Terselenggaranya Karanganyar Award				0	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	30.000.000		780.000.000
	Jumpa pers / kemitraan dengan pers	Terselenggaranya kegiatan Jumpa pers Bupati Karanganyar dengan wartawan	kali		1 0	50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	10	50.000.000
	Siaran televisi	Terselenggaranya talkshow Bupati dan pejabat Pemkab. Karanganyar dengan masyarakat melalui media televisi	kali		2	24.000.000		0	0	0	0	0	0	0	2	24.000.000
	Promosi Informasi	Terlaksananya Promosi Informasi Pemkab melalui Baliho dan Spanduk	unit		4 1	87.400.000	41	289.000.000	41	289.000.000	41	300.000.000	41	325.000.000	205	1.290.400.000
	<b>Peringatan Hari Radio Nasional</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Radio Nasional</b>	<b>paket</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000.000</b>
	Press Tour	Terlaksananya study banding awak media dan tim liputan Diskominfo	kali		1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	975.000.000
<b>2.3. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>			<b>%</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		<b>15</b>		<b>20</b>		<b>25</b>		<b>30</b>			

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Infomasi					589.100.000		4.011.000.000		3.563.000.000		2.718.500.000		3.017.500.000		13.899.100.000
	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	40	45		50		60		70		85		85	
	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	25	30		35		40		45		50		50	
Peningkatan kapasitas Bandwidth	Terlaksananya Langganan akses internet	bulan		1	100.000.000	12	900.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	16	4.150.000.000
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kab. Karanganyar	Terlaksananya pemeliharaan Komputer Jaringan	bulan		12	34.700.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	12	220.000.000	60	804.700.000
Pengelolaan/ Pemeliharaan Website	Terlaksananya Updating Web dan Lomba Konten web	paket		1	20.600.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	5	440.600.000
Pengelolaan Data Informasi	Terlaksananya olah data strategis kab.karanganyar	bulan		12	50.000.000	12	225.000.000	12	235.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000	60	1.000.000.000
	Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan TIK	bulan		0	0	12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	19.000.000	48	63.000.000
Peningkatan Sarana Pengolahan Data Elektronik	Tersedianya Sarana PDE	bulan		12	50.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	60	340.000.000
	Terlaksananya pemeliharaan sarana PDE					12	24.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	48	129.000.000
	Terlaksananya operasionalisasi sarana PDE					12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000
Operasional Sekretariat LPSE	Tersedianya data pengadaan barang secara elektronik, secara tepat dan akurat.	bulan		12	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	12	50.000.000
Pengembangan Hotspot	Tersedianya fasilitas hotspot internet di Kab. Karanganyar.	Titik lokasi	22	3	25.000.000	5	77.000.000	5	80.000.000	5	85.000.000	5	90.000.000	23	357.000.000
Fasilitasi dan Pengembangan Smart City	Terselenggaranya peningkatan kapasitas smart city	orang		240	18.300.000	240	180.000.000	240	200.000.000	240	210.000.000	240	220.000.000	1.200	828.300.000
Disaster Recovery Center (DRC)	Terlaksananya sewa cloud server sebagai tempat backup data	bulan	12	12	24.500.000	12	72.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60	331.500.000
Pengembangan Aplikasi Sisten Informasi Managemen Daerah (SIMDA)	terlaksananya pembuatan Aplikasi SIMDA	bulan	12	12	58.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	60	738.000.000
	Terlaksananya operasionalisasi Aplikasi SIMDA	bulan	12	0	0	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000

Pengelolaan CCTV Online	Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan CCTV Online	titik	30	3	25.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	43	505.000.000
Operasionalisasi Papan Reklame Elektronik	Tercukupinya Pulsa listrik	bulan	12	1 2	15.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	60	355.000.000
	Tersedianya sarana pengumuman Digital	Titik lokasi	0	0	0	20	600.000.000	20	50.000.000	20	75.000.000	20	100.000.000	80	825.000.000
Pengelolaan Aplikasi SMS Center dan SAPAMAS	Terlaksananya operasionalisasi aplikasi SAPAMAS	bulan	12	1 2	43.000.000		0		0		0		0		43.000.000
Pengelolaan Layangmas (Layanan Anggota Masyarakat)	terlaksananya updating Aplikasi Online LAYANGMAS	paket		1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	145.000.000
Perkantoran elektronik	Terlaksananya Updating dan pengembangan Aplikasi Perkantoran Elektronik	kali		1	25.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	17.500.000	1	17.500.000	5	92.000.000
Pengelolaan Sambernyawa Information System (SIC)	Terlaksananya Updating Aplikasi Dashboard	Aplikasi	1	1	25.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	265.000.000
Pengelolaan Videowall	terlaksananya Operasionalisasi perangkat videowall	kali	9	1 2	25.000.000	8	40.000.000	8	42.000.000	8	44.000.000	8	46.000.000	44	197.000.000
	Pengadaan perangkat videowall	Titik lokasi	1	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	0	2	2.000.000.000
<b>Program Persandian</b>					<b>85.000.000</b>		<b>545.000.000</b>		<b>#####</b>		<b>555.000.000</b>		<b>560.000.000</b>		<b>2.795.000.000</b>
	<b>Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>	%	<b>5</b>	<b>1 0</b>		<b>15</b>		<b>20</b>		<b>25</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	
Pengelolaan Persandian	Security Assesment, Update aplikasi server, web server	unit	4	4	25.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	20	195.000.000
Pengembangan Jaringan WAN Kab. Karanganyar	Terlaksananya pengembangan dan operasionalisasi Jaringan WAN	paket		1	50.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.550.000.000
Operasional Sekretariat BLC	Terlaksananya Kegiatan pelatihan Komputer	orang	200	2 0 0	10.000.000	200	10.000.000	20 0	10.000.000	20 0	10.000.000	200	10.000.000	1.00 0	50.000.000
<b>Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>				<b>10.000.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10.000.000</b>

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan (SPIP)	Terwujudnya Dokumen Pelaporan Pengendalian ternal Pemerintah tahun 2019	Dokumen	1	1	10.000.000									1	10.000.000
<b>Program Penataan Peraturan perundang undangan</b>					<b>46.800.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>46.800.000</b>
Penyusunan Perubahan perda dan perbup pengendalian menara telekomunikasi	Tersusunnya perubahan perda dan perbup tentang menara telekomunikasi	Dokumen (Perda/Perbup)	0	2	46.800.000									2	46.800.000

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya ekonomi masyarakat yang kokoh, Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks SPBE	Evaluasi berkala Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Nilai	NA	2.14	2,37	2,69	2,91	3	3
Persentase layanan publik yang berbasis elektronik	Jumlah layanan publik berbasis elektronik dibagi jumlah layanan publik keseluruhan di kali 100	%	40	45	50	60	70	85	85
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah Perangkat Daerah Keseluruhan (termasuk didalamnya kecamatan) dikali 100	%	5	10	15	20	25	30	30



Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan (UU 23 tahun 2014)	Jumlah data perurusan yang tersedia dibagi jumlah semua urusan dikali 100	%	60	70	80	90	100	100	100
Nilai SAKIP	Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan,	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
% website resmi Perangkat Daerah yang terupdate (DIP)	Jumlah website Perangkat Daerah yang up date (informasi berkala, setiap saat, serta merta, dikecualikan) dibagi jumlah seluruh website Perangkat Daerah (termasuk kecamatan) dikali 100	%	61,90	69,05	78,57	85,71	92,86	100,00	100,00
% KIM aktif	Jumlah KIM yang aktif dibagi seluruh jumlah KIM yang dibentuk dikali 100	%	35,29	47,06	58,82	76,47	88,24	100,00	100,00
Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	Jumlah layanan pemerintahan yang berbasis elektronik dibagi jumlah seluruh layanan pemerintahan dikali 100	%	40	45	50	60	70	85	85

Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	Jumlah aplikasi PD yang telah terintegrasi dibagi jumlah seluruh aplikasi di kali 100	%	25	30	35	40	45	50	50
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah PD yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah seluruh PD dikali 100	%	5	10	15	20	25	30	30
Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral yang harus ada di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Program Transisi**

Periode Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	
2.	Kepala BAPERLITBANG	
3.	Kepala DISKOMINFO	



